

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Teori Legitimasi**

Berdasarkan teori legitimasi, organisasi maupun perusahaan akan terus mencoba meyakinkan masyarakat bahwa aktivitas yang mereka lakukan telah sesuai dengan batasan maupun norma yang berlaku di masyarakat. Menurut Ghazali dan Chariri (2007), teori legitimasi pada dasarnya berkaitan dengan kontrak sosial yang terjadi antara pihak perusahaan dengan pihak masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Kontrak sosial tersebut tertuang baik secara eksplisit maupun implisit di mana kelangsungan hidup dan pertumbuhan perusahaan didasarkan pada kontribusi perusahaan kepada masyarakat luas termasuk distribusi manfaat ekonomi, sosial atau politik kepada berbagai kelompok sesuai dengan power yang dimiliki.

Penerimaan masyarakat atas keberadaan perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan sebuah perusahaan. Maka dari itu, agar dapat diterima oleh masyarakat, perusahaan harus menyelaraskan seluruh aktivitas perusahaan dengan norma yang berlaku di masyarakat sekitar. Apabila perusahaan tidak menyelaraskan aktivitas perusahaan dengan norma yang berlaku di masyarakat, maka akan terjadi legitimasi *gap* yang pada akhirnya akan mengganggu keberlangsungan perusahaan.

Menurut Oktafianti dan Rizki (2015), hal-hal yang dapat meningkatkan legitimasi antara lain etika bisnis, pengembangan kinerja karyawan, serta tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jadi, berdasarkan teori legitimasi, pengungkapan tanggung jawab lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan sesungguhnya merupakan upaya perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat sekitar. Legitimasi dari masyarakat tersebut diharapkan akan menimbulkan dampak positif bagi perusahaan dalam jangka panjang.

## **2. Teori *Stakeholders***

Berdasarkan teori *stakeholders*, perusahaan bukanlah entitas yang sekedar beroperasi untuk kepentingannya sendiri, melainkan juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholders* perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007). Freeman dan Mcvea (2001) mendefinisikan *stakeholders* sebagai individu atau kelompok yang dapat mempengaruhi dan/atau dipengaruhi oleh proses pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholders* terdiri dari *shareholders*, konsumen, *supplier*, kreditor, masyarakat, pemerintah dan berbagai pihak lainnya.

Pengungkapan sosial dan lingkungan merupakan bentuk komunikasi antara perusahaan dengan *stakeholders* perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007). Komunikasi antara perusahaan dengan *stakeholders* ini dilakukan karena perusahaan menganggap *stakeholders* sebagai pihak yang sangat berpengaruh bagi kelangsungan perusahaan. Atas dasar

anggapan tersebut, perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan (termasuk pengungkapan lingkungan) senantiasa mempertimbangkan pengaruh *stakeholders*.

### 3. Teori Agensi

Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan tentang hubungan kesepakatan antara *principal* dengan agen guna menghasilkan perjanjian atau kontrak. *Principal* (pemilik) memiliki kepentingan untuk mengetahui informasi dan aktivitas manajemen terkait dengan dana yang diinvestasikan dalam suatu perusahaan. Informasi ini juga merupakan bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas kinerja manajemen.

Teori agensi juga mengungkapkan bahwa sesungguhnya antara pihak *principal* dan agen memiliki kepentingan yang berbeda. Maka dari itu, menurut Jensen dan Meckling (1976), berdasarkan teori agensi, dalam suatu proses bisnis terdapat konflik kepentingan yang melibatkan antara *principal* dan agen. Struktur kepemilikan dianggap sebagai salah satu aspek mekanisme *corporate governance* yang dapat mengurangi konflik kepentingan tersebut. Secara spesifik, struktur kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan saham manajerial. Hal ini dikarenakan manajer yang memiliki saham di perusahaan menjadi memiliki dua peran yakni sebagai agen dan sebagai *principal* sehingga manajer akan senantiasa menyelaraskan kedua kepentingan tersebut dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh manajer.

#### 4. *Signalling Theory*

*Signalling theory* berakar pada teori akuntansi pragmatik yang memusatkan perhatiannya kepada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai informasi (Suwardjono, 2005). Jadi, berdasarkan *signalling theory*, pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan merupakan usaha perusahaan untuk memberikan sinyal kepada pihak eksternal tentang kondisi perusahaan. Sinyal berupa informasi yang diungkapkan oleh perusahaan akan menimbulkan berbagai reaksi dari pihak eksternal khususnya investor.

Dalam rangka memberikan sinyal positif, perusahaan tidak hanya menyajikan pengungkapan informasi yang bersifat wajib, melainkan juga informasi yang bersifat sukarela. Pengungkapan informasi yang bersifat sukarela dianggap memberikan sinyal yang menggambarkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik. Hal ini mengingat bahwa pada umumnya perusahaan yang bersedia melakukan pengungkapan informasi yang bersifat sukarela hanya perusahaan yang sedang dalam kondisi baik. Sinyal berupa pengungkapan informasi yang bersifat sukarela tersebut pada akhirnya akan direspon positif oleh pihak eksternal (khususnya investor) sehingga perusahaan akan diuntungkan. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa *signalling theory* merupakan teori yang mendasari pengungkapan informasi yang bersifat sukarela termasuk pengungkapan informasi tentang tanggung jawab terhadap lingkungan.

## 5. *Nature Theory*

Berdasarkan *Nature theory*, sesungguhnya perbedaan antara pria dan wanita merupakan sebuah kodrat yang harus diterima. Perbedaan secara biologis ini berdampak pada perbedaan peran dan tugas di antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, dalam kehidupan sehari-hari, terdapat peran dan tugas yang dapat dipertukarkan antara pria dan wanita (Kementerian Pemberdayaan Perempuan, BKKBN & UNFPA, 2005).

Seiring dengan berkembangnya emansipasi wanita, semakin banyak peran yang dapat dipertukarkan antara pria dan wanita. Profesi yang dahulu dianggap tabu untuk dikerjakan oleh wanita, kini menjadi sesuatu yang wajar dilakukan oleh wanita. Tak jarang justru wanita memiliki jabatan yang lebih tinggi dari kaum pria.

Walaupun banyak peran dan tugas yang dapat dipertukarkan antara pria dan wanita, akan tetapi berdasarkan *Nature theory*, pria dan wanita memang dilahirkan berbeda dan tidak bisa disamakan. Sekalipun pria dan wanita berada pada peran atau profesi yang sama, namun kinerja dan pola pikirnya akan berbeda. Berdasarkan *Nature theory*, hal ini dikarenakan kepribadian manusia dibentuk oleh faktor biologis dan genetika yang berbeda-beda yang muncul secara alamiah.

## 6. *Environmental Disclosure*

*Environmental disclosure* adalah bagian dari *corporate social responsibility (CSR) disclosure* yang dinyatakan dalam *annual report* maupun *sustainability report* (laporan berkelanjutan). *Environmental disclosure* pada dasarnya merupakan pengungkapan informasi dan aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Bila merujuk kepada *Global Reporting Initiative's (GRI)*, informasi yang diungkapkan dalam *environmental disclosure* antara lain adalah berbagai informasi mendetail mengenai dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan hidup serta berbagai upaya perusahaan untuk melestarikan lingkungan hidup.

*Environmental disclosure* merupakan pengungkapan informasi yang bersifat *voluntary* (sukarela). Hal ini dikarenakan sampai detik ini belum ada standar maupun regulasi yang mengatur tentang format, isi, maupun luas pengungkapannya. Sifat *environmental disclosure* yang *voluntary* ini mengakibatkan tingkat *environmental disclosure* menjadi berbeda-beda antara perusahaan satu dengan yang lain tergantung pada kebijakan masing-masing perusahaan.

Dalam mengukur *environmental disclosure* dibutuhkan suatu *checklist* yang berisi item-item atau indikator pengungkapan yang kemudian dicocokkan dengan pengungkapan yang terdapat dalam laporan tahunan perusahaan. Pengukuran *environmental disclosure* dalam penelitian ini menggunakan indikator lingkungan pada *Global Reporting*

*Initiative's (GRI) G4. Global Reporting Initiative's (GRI)* merupakan sebuah kerangka yang dapat diterima umum dalam melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dari organisasi. Kerangka ini dapat digunakan oleh berbagai jenis organisasi yang berbeda, baik dari segi ukuran, sektor, maupun lokasinya (*Global Reporting Initiative's, 2015*)

GRI merekomendasikan beberapa aspek yang berkaitan dengan lingkungan yang harus diungkapkan dalam annual report. Terdapat 34 indikator yang direkomendasikan oleh GRI yang merupakan penjabaran dari 12 aspek. Adapun 12 aspek tersebut antara lain bahan baku, energi, air, keanekaragaman hayati, emisi, *effluent* dan limbah, produk dan jasa, kepatuhan, transportasi, lain-lain, asesmen pemasok atas lingkungan, serta mekanisme pengaduan masalah lingkungan.

## **7. Kepemilikan Manajerial**

Salah satu hal yang dikelola dalam mekanisme *corporate governance* adalah tentang hubungan pemegang saham dan pengelola perusahaan. Kepemilikan manajerial merupakan mekanisme *corporate governance* yang memadukan kedua hal tersebut. Kepemilikan manajerial adalah para pemegang saham yang memiliki kedudukan pada manajemen dan secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di perusahaan.

Kepemilikan manajerial dinilai memiliki dampak positif bagi perusahaan karena akan timbul rasa memiliki terhadap perusahaan di benak anggota manajemen yang memiliki saham perusahaan. Jajaran

manajemen yang memiliki saham dalam perusahaan menjadi memiliki dua peran yakni sebagai agen dan sebagai *principal*. Atas hal tersebut, jajaran manajemen akan senantiasa menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer (agen) dengan kepentingannya sebagai pemegang saham (*principal*). Semakin tinggi saham yang dimiliki, maka kinerja manajemen akan semakin produktif guna meningkatkan citra perusahaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraannya sebagai pemegang saham.

#### **8. *Political Visibility***

*Political visibility* pada dasarnya adalah tentang bagaimana sorotan masyarakat dan pemerintah terhadap perusahaan. *Political visibility* diprosikan dengan ukuran perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar cenderung akan mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat maupun pemerintah. Besarnya *political visibility* akan berdampak pada meningkatnya biaya politik dan peraturan terkait yang lebih ketat.

Menurut Suhendah dan Haryanto (2014), perusahaan yang menghadapi *political visibility* yang semakin besar, maka manajer akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat menghasilkan laba sekarang lebih rendah dari pada laba di masa depan. Hal ini dilakukan guna menurunkan *political visibility* perusahaan. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membuat laba menjadi berkurang adalah dengan melakukan pengungkapan berbagai informasi.



## **9. Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan mengendalikan sumberdaya yang dimiliki. Kinerja keuangan juga merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan sebagai gambaran tentang kondisi perusahaan. Maka dari itu, kinerja keuangan selalu menjadi dasar dalam setiap kebijakan perusahaan dan juga dijadikan sebagai dasar oleh penilaian investor.

Dalam penelitian ini, kinerja keuangan perusahaan diukur berdasarkan rasio profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas. Profitabilitas merupakan ukuran tentang kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Kemudian, likuiditas merupakan ukuran tentang kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutang jangka pendek. Sedangkan solvabilitas merupakan ukuran tentang kemampuan perusahaan dalam melunasi seluruh hutang jika perusahaan dilikuidasi atau mengalami pailit.

## **10. Board Gender**

Salah satu isu mekanisme *corporate governance* yang berkembang beberapa tahun terakhir adalah isu *board diversity* berbasis gender. *Board diversity* merupakan sebuah keragaman yang ada dalam susunan keanggotaan dewan direksi. Keberagaman dewan direksi ini bisa didasarkan pada berbagai hal misalnya etnis, keahlian, gender, dsb. Seiring berkembangnya emansipasi wanita, salah satu isu yang berkembang dalam

adalah *board diversity* berbasis gender. *Board diversity* berbasis gender diartikan sebagai keragaman gender yang ada pada dewan direksi.

Dewasa ini, keberadaan wanita dalam jajaran direksi cukup mengalami peningkatan. Hal ini karena keberadaan wanita dinilai memberikan dampak positif bagi perusahaan. Menurut Kusumastuti *et al.*, (2007), wanita memiliki sikap hati-hati, cenderung menghindari risiko, dan cenderung lebih teliti dibandingkan pria. Oleh karena itu dengan adanya wanita di jajaran direksi, keputusan yang diambil dinilai lebih tepat dan memiliki risiko lebih rendah. Selain itu, menurut Krishnan dan Park (2005), wanita dianggap memiliki perasaan kognitif. Perasaan kognitif pada wanita ini dianggap dapat berpengaruh positif terhadap nilai dan keharmonisan dalam organisasi yang dapat mendorong keterbukaan informasi dan sumber daya, memberikan kepemimpinan yang lebih demokratis, serta dapat meminimalisir konflik.

## **B. Penelitian Terdahulu dan Penurunan Hipotesis**

### **1. Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *environmental disclosure***

Menurut Jensen dan Meckling (1976), berdasarkan teori agensi, dalam proses bisnis terdapat konflik kepentingan yang melibatkan antara *principal* dan agen. Kepemilikan saham manajerial dinilai dapat meminimalisir konflik kepentingan antara pemegang saham dengan pihak manajemen. Kepemilikan manajerial merupakan para pemegang saham yang memiliki kedudukan pada manajemen perusahaan dan secara aktif

ikut dalam pengambilan keputusan pada perusahaan. Dalam kata lain, kepemilikan manajerial merupakan para manajer atau jajaran direksi yang memiliki saham dalam perusahaan. Jajaran direksi yang memiliki saham perusahaan akan berperan sebagai agen dan sebagai *principal*, sehingga manajer tersebut akan menyelaraskan dua kepentingan yang dimiliki. Sebagai pemegang saham, manajer memiliki kepentingan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Maka dari itu, kebijakan yang diambil cenderung berorientasi pada peningkatan laba.

*Environmental disclosure* dinilai sebagai kebijakan yang dapat meningkatkan citra perusahaan. Citra perusahaan yang meningkat tentu akan berdampak positif pula terhadap kepentingan manajer sebagai pemegang saham. Maka dari itu, *environmental disclosure* dapat dijadikan sebagai cara manajer untuk menyelaraskan kepentingannya sebagai manajer dan sebagai pemegang saham.

Penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini (2011) dan Suaryana (2012) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tarmizi (2012) serta Oktafianti dan Rizki (2015) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Fama dan Jensen (1983) juga menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan manajerial, maka semakin tinggi pula motivasi perusahaan untuk melakukan pengungkapan berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

**H<sub>1a</sub> : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia.**

**H<sub>1b</sub> : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Malaysia.**

## **2. Pengaruh ukuran perusahaan (*political visibility*) terhadap *environmental disclosure***

*Political visibility* pada dasarnya adalah berkaitan dengan bagaimana sorotan masyarakat maupun pemerintah terhadap perusahaan. Menurut Manihuruk dan Farahmita (2015), berdasarkan *political cost hypothesis*, perusahaan besar berusaha untuk menunjukkan konservatisme pada profitabilitas mereka untuk menghindari *political visibility* yang akan berdampak pada meningkatnya biaya politik dan peraturan terkait yang lebih ketat. Hal ini dilakukan karena memang pada umumnya perusahaan yang memiliki ukuran lebih besar cenderung memiliki *political visibility* yang lebih besar. Maka dari itu, *political visibility* diproksikan dengan ukuran perusahaan.

Kemudian, menurut Agusti (2010), perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat, sangat dimungkinkan memiliki pemegang saham yang lebih memperhatikan program-program sosial dan lingkungan yang dibuat oleh perusahaan. Maka dari itu, sebagai bentuk tanggung

jawab terhadap pemegang saham, perusahaan yang memiliki ukuran besar akan cenderung melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang lebih luas.

Menurut Suhendah dan Haryanto (2014), perusahaan yang menghadapi *political visibility* yang semakin besar, maka manajer akan cenderung memilih prosedur akuntansi yang dapat menghasilkan laba sekarang lebih rendah dari pada laba di masa depan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menurunkan laba perusahaan adalah dengan melakukan pengungkapan berbagai informasi. Pengungkapan informasi akan menimbulkan biaya sehingga otomatis akan menurunkan laba.

Berbagai penjelasan di atas sangat relevan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2005), Agusti (2010) serta Suhendah dan Haryanto (2014) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap CSR *disclosure*. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Paramitha dan Rohman (2014) serta Oktafianti dan Rizki (2015) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

**H<sub>2a</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia.**

**H<sub>2b</sub> : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Malaysia.**

### 3. Pengaruh profitabilitas terhadap *environmental disclosure*

Profitabilitas dapat diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba, maka dari itu profitabilitas merupakan salah satu ukuran yang dapat mencerminkan kinerja ekonomi suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik, sedangkan perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang rendah bahkan rasionya negatif maka dapat diartikan bahwa perusahaan tersebut memiliki kinerja yang tidak baik bahkan buruk.

Profitabilitas merupakan hal yang penting bagi kelangsungan hidup perusahaan, maka dari itu umumnya perusahaan menjadikan profitabilitas sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perusahaan. Termasuk dalam *environmental disclosure*, perusahaan yang kinerja ekonominya tidak baik yang ditunjukkan dengan tingkat profitabilitas yang rendah cenderung enggan mengalokasikan uangnya untuk *environmental disclosure* setidaknya pada tahun tersebut. Berdasarkan *signalling theory*, perusahaan dengan profitabilitas tinggi akan memperkuat sinyal positifnya dengan melakukan pengungkapan informasi yang bersifat sukarela termasuk *environmental disclosure*.

Hal ini sejalan dengan pendapat Eljido-Ten (2014) bahwa perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas rendah, perhatian perusahaan terhadap lingkungan cenderung kurang. Kurangnya perhatian terhadap lingkungan tersebut dikarenakan perusahaan yang memiliki

tingkat profitabilitas rendah cenderung lebih fokus untuk memperbaiki kinerja ekonomi perusahaan. Kurangnya perhatian terhadap lingkungan ini tentu akan berdampak pada kurangnya tingkat *environmental disclosure*.

Kemudian, menurut Meek *et al.*, (1995) dalam Oktafianti dan Rizki (2015), perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi, maka akan memiliki sumber daya yang lebih banyak untuk melakukan pengungkapan lingkungan. Atas dasar pendapat tersebut, dapat diasumsikan bahwa apabila suatu perusahaan memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi, maka tingkat *environmental disclosure* perusahaan juga akan tinggi.

Berbagai penjelasan tersebut bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Paramitha dan Rohman (2014), serta Nisan (2014) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Oktafianti dan Rizki (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *environmental disclosure*. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh Tarmizi (2012) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

**H<sub>3a</sub> : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia.**

**H<sub>3b</sub> : Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Malaysia.**

#### 4. Pengaruh likuiditas terhadap *environmental disclosure*

Likuiditas juga dapat dijadikan sebagai pengukur kinerja keuangan perusahaan. Likuiditas merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang-hutang jangka pendek. Jadi, perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi, artinya perusahaan tersebut mampu melunasi hutang-hutang jangka pendek.

Perusahaan yang memiliki rasio likuiditas tinggi berarti memiliki jumlah aset lancar yang lebih besar dari pada hutang lancar. Hal ini merupakan sinyal positif bagi para *stakeholders* bahwa perusahaan dalam kondisi baik. Pada umumnya perusahaan yang memiliki likuiditas yang baik akan memperkuat sinyal positif perusahaan kepada *stakeholders* dengan melakukan pengungkapan informasi tambahan termasuk informasi aktivitas tanggung jawab lingkungan.

Kemudian, Iswandika *et al.*, (2014) juga menyatakan bahwa perusahaan dengan likuiditas yang tinggi akan memberikan sinyal bahwa mereka lebih baik daripada perusahaan lain. Sinyal ini ditunjukkan dengan melakukan berbagai aktivitas yang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan ini kemudian diungkapkan dalam laporan tahunan sebagai *environmental disclosure*. Maka, dapat diasumsikan bahwa likuiditas perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Kamil dan Herusetya (2012), Iswandika *et al.*, (2014), dan Ekowati *et al.*, (2014) menunjukkan bahwa



likuiditas tidak berpengaruh terhadap CSR *disclosure*. Akan tetapi, hasil penelitian yang dilakukan oleh Syahrir dan Suhendra (2010) menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap CSR *disclosure*. Penelitian ini akan menguji pengaruh likuiditas terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

**H<sub>4a</sub> : Likuiditas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia.**

**H<sub>4b</sub> : Likuiditas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Malaysia.**

## **5. Pengaruh solvabilitas terhadap *environmental disclosure***

Solvabilitas adalah ukuran kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau melunasi hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi atau mengalami pailit. Jadi, solvabilitas sangat berkaitan dengan kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan. Perusahaan yang memiliki rasio solvabilitas tinggi diasumsikan bahwa perusahaan tersebut dapat *going concern*.

Laporan tentang tingkat solvabilitas perusahaan sangatlah penting bagi para kreditur. Hal tersebut penting karena menyangkut tentang bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak-hak para kreditur. Menurut Rahajeng (2010), untuk menghilangkan keraguan para kreditur tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi hak-hak mereka

sebagai kreditur, perusahaan wajib untuk memenuhi kebutuhan informasi para kreditur jangka panjang.

Perusahaan dengan rasio solvabilitas yang tinggi memiliki kemungkinan untuk memenuhi kebutuhan informasi para kreditur jangka panjang dengan cara menyediakan informasi secara lebih komprehensif (Iswandika *et al.*, 2014). Salah satu informasi yang diungkapkan adalah pengungkapan sosial dan lingkungan. Hal ini dikarenakan pengungkapan sosial dan lingkungan dapat mencerminkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan untuk *going concern*.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahajeng (2010), Kamil dan Herusetya (2012) dan Iswandika *et al.*, (2014) menunjukkan bahwa solvabilitas tidak berpengaruh terhadap CSR *disclosure*. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan Na'im dan Rakhman (2000) menunjukkan bahwa rasio solvabilitas berpengaruh positif terhadap CSR *disclosure*. Pada penelitian ini, akan mencoba menguji pengaruh solvabilitas terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

**H<sub>5a</sub> : Solvabilitas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia.**

**H<sub>5b</sub> : Solvabilitas berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Malaysia.**

## **6. Pengaruh keberadaan direksi wanita (*board gender*) terhadap *environmental disclosure***

Menurut Krishnan dan Park (2005), wanita dianggap memiliki perasaan kognitif. Perasaan kognitif pada wanita ini dianggap dapat berpengaruh positif terhadap nilai dan keharmonisan dalam organisasi yang mana mendorong keterbukaan informasi dan sumber daya, memberikan kepemimpinan yang lebih demokratik, serta dapat meminimalisir konflik.

Selain itu, menurut Kusumastuti *et al.*, (2007), wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko dan lebih teliti dibandingkan pria. Sikap-sikap positif yang dimiliki wanita tersebut sangat berdampak positif terhadap pengambilan keputusan dewan direksi. Keputusan maupun kebijakan yang diambil oleh direksi wanita dianggap lebih tepat dan mengandung risiko yang lebih rendah.

Salah satu hal yang sangat penting untuk diputuskan oleh dewan direksi adalah tentang bagaimana tingkat pengungkapan sukarela perusahaan termasuk pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*). Keberadaan direksi wanita dengan segala kelebihanya dianggap dapat meningkatkan pengungkapan informasi yang bersifat sukarela. Hal ini dikarenakan pengungkapan informasi yang bersifat sukarela tersebut sangat efektif untuk meningkatkan citra perusahaan yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak positif bagi perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Feijoo *et al.*, (2012) di Jepang, Australia dan UK menunjukkan bahwa proporsi direksi wanita berpengaruh positif terhadap *voluntary disclosure*. Penelitian tentang pengaruh keberadaan direksi wanita terhadap *voluntary disclosure* akan coba dianalogikan terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

**H<sub>6a</sub> : Keberadaan direksi wanita berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Indonesia.**

**H<sub>6b</sub> : Keberadaan direksi wanita berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* di Malaysia.**

## **7. Perbedaan Tingkat *Environmental Disclosure* di Indonesia dan Malaysia**

Dewasa ini, kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas perusahaan semakin marak terjadi. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga terjadi di seluruh penjuru dunia. Negara-negara maju umumnya memiliki sistem hukum yang tegas untuk meminimalisir hal tersebut. Dewasa ini, negara-negara berkembang seperti Indonesia dan Malaysia pun mulai meningkatkan upaya mereka dalam mengurangi kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan.

Indonesia dan Malaysia merupakan negara berkembang yang berada di wilayah yang sama yakni Asia Tenggara di mana telah diberlakukan ASEAN *Economic Community*. Diberlakukannya ASEAN

*Economic Community* bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara-negara di Asia Tenggara. Besarnya harapan dan upaya untuk memajukan perekonomian harus diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup. Apabila tidak diimbangi dengan peningkatan tanggung jawab terhadap lingkungan hidup, maka akan sangat berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Maka dari itu, selain masalah ekonomi, masalah tanggung jawab terhadap lingkungan hidup di kedua negara tersebut juga sangat penting untuk diperhatikan.

Realitanya, masih banyak perusahaan Indonesia dan Malaysia yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Pencemaran sungai dan kebakaran hutan di berbagai daerah di Sumatera, Kalimantan, dan Papua merupakan salah satu bukti bahwa kerusakan lingkungan akibat aktivitas perusahaan di Indonesia masih cukup tinggi. Secara tidak langsung hal ini juga menunjukkan bahwa penerapan *environmental disclosure* di Indonesia masih membutuhkan perbaikan. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga di Malaysia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Buniamin (2011) menunjukkan bahwa pelaporan lingkungan di Malaysia masih rendah, maka perlu adanya perbaikan.

Walaupun sama-sama membutuhkan perbaikan, namun tingkat *environmental disclosure* di setiap negara pasti berbeda-beda. Kondisi sumber daya alam, ekonomi, dan perbedaan permasalahan lingkungan dan sosial yang berkembang di kedua negara bisa jadi alasan untuk menyatakan bahwa penerapan *environmental disclosure* di Indonesia dan

Malaysia berbeda. Asumsi ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2015) yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan tingkat *environmental disclosure* di Indonesia, Malaysia dan Thailand.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

**H<sub>7</sub> : Terdapat perbedaan tingkat *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia.**

#### **8. Perbedaan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen di Indonesia dan Malaysia**

Indonesia dan Malaysia memiliki regulasi pelaporan keuangan yang berbeda. Standar laporan keuangan di Indonesia menggunakan standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1, sedangkan Malaysia Standar laporan keuangan Malaysia menggunakan standar *Malaysia Accounting Standard Board (MASB)*. Kendati Indonesia dan Malaysia memiliki lembaga pengawas dalam pelaporan keuangan, kepatuhan dan ketegasan dalam menegakkan regulasi di Indonesia dan Malaysia berbeda. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Hary *et al.*, (2012) bahwa *Enforcement* di Indonesia tidak lebih baik apabila dibandingkan dengan *Enforcement* di Malaysia dan Singapura.

Selain itu, Indonesia dan Malaysia juga memiliki sistem *corporate governance* yang berbeda. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Indonesia menganut *two tier system*.

Sedangkan Malaysia, berdasarkan praktik yang ada, perusahaan Malaysia lebih cenderung menganut *one tier system*. Hal ini akan berdampak pada perbedaan pengaruh variabel-variabel independen terhadap *environmental disclosure* mengingat bahwa yang menjadi variabel penelitian ini berkaitan dengan laporan keuangan dan *corporate governance*.

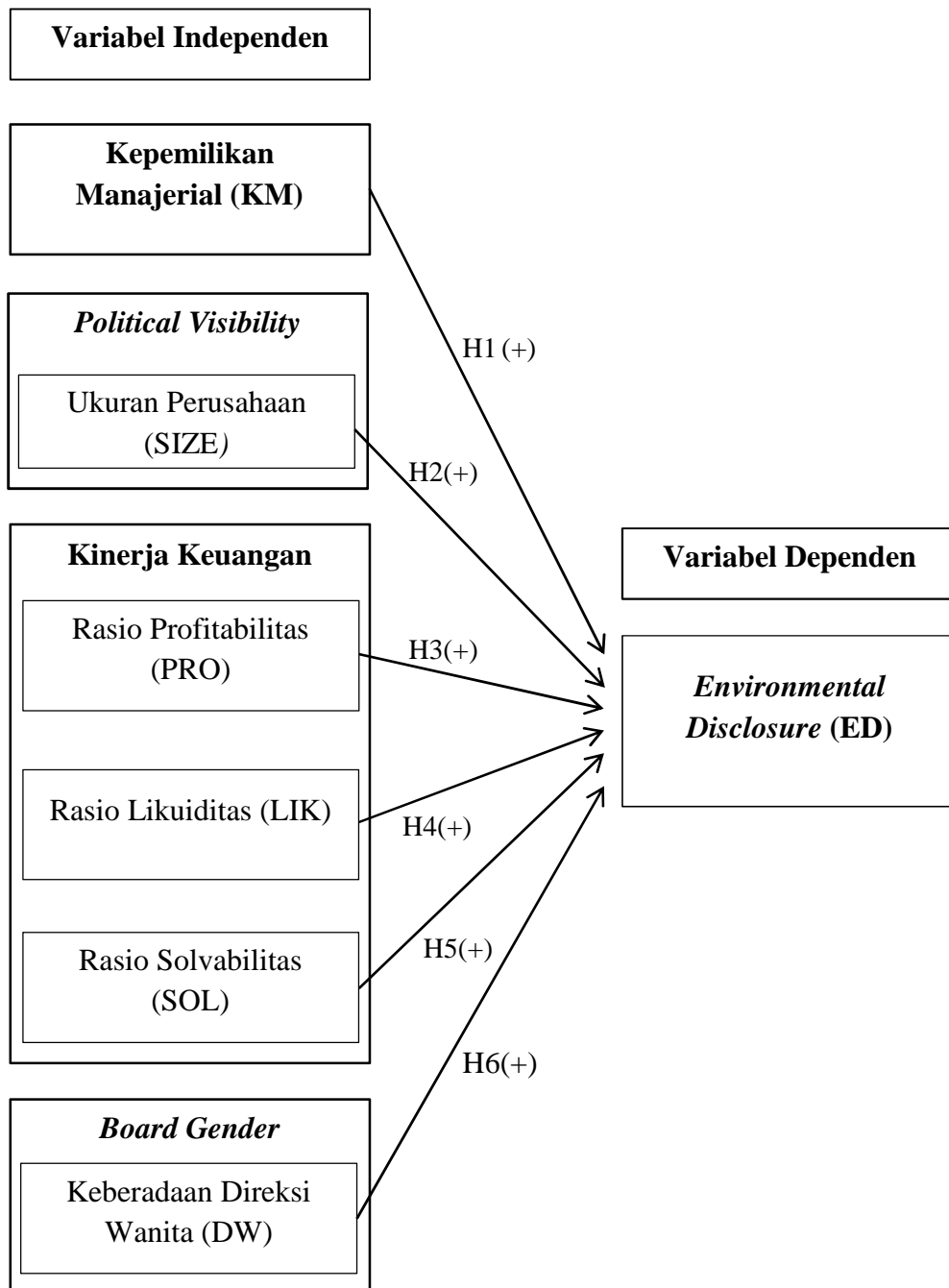
Penelitian yang dilakukan oleh Rikhana (2015) menyatakan bahwa terdapat perbedaan pengaruh antara proporsi dewan komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, *size*, *leverage*, dan profitabilitas terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia. Walaupun dalam penelitian ini terdapat beberapa variabel yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rikhana (2015), namun mengingat negara yang dibandingkan adalah negara yang sama maka dapat diasumsikan bahwa hasil uji kesamaan koefisien pada penelitian ini hasilnya akan tidak jauh berbeda. Dalam kata lain, diasumsikan bahwa hasil uji kesamaan koefisien pada penelitian ini hasilnya adalah terdapat perbedaan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat di Indonesia dan Malaysia.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis:

**H<sub>8</sub> : Terdapat perbedaan pengaruh kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, solvabilitas dan keberadaan direksi wanita terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia**

### C. Model Penelitian

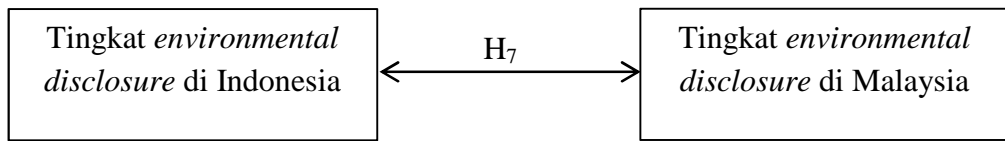
Pengaruh kepemilikan saham manajerial, ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan keberadaan direksi wanita terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia



**Gambar 2.1**  
Model Penelitian Hipotesis 1 – Hipotesis 6

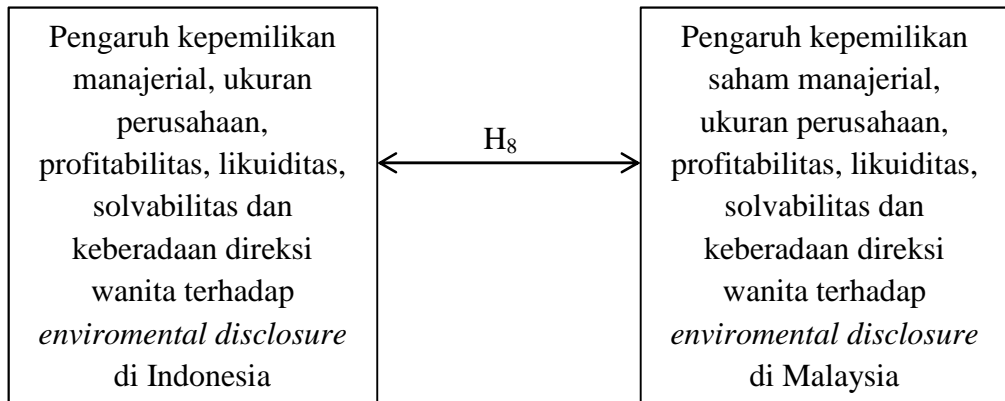


**Perbedaan tingkat *environmental disclosure* di Indonesia dan Malaysia**



**Gambar 2.2**  
**Model Penelitian Hipotesis 7**

**Perbedaan pengaruh kepemilikan manajerial, ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, solvabilitas dan keberadaan direksi wanita terhadap *environmental disclosure* di Indonesia dan di Malaysia**



**Gambar 2.3**  
**Model Penelitian Hipotesis 8**